JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 2 No: 3, Juni – Juli 2025
E-ISSN : 3046-4560

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI ACEH TAHUN 2021-2024

THE EFFECT OF THE BALANCE FUND, REGIONAL ORIGINAL REVENUE AND REGIONAL EXPENDITURE ON THE WELFARE OF THE PEOPLE IN THE ACEH PROVINCE IN 2021-2024

Hastanti Listyaningtyas[1*], Muttaqien[2], Rico Nur Ilham[3], Chairil Ahyar[4]
[1,2,3,4] Manajemen, Ekonomi, Universitas Malikussaleh
Email : hastanti.210410268@mhs.unimal.ac.id[1], muttaqien@unimal.ac.id[2], riconurilham@unimal.ac.id[3], chairilakhyar@unimal.ac.id[4]*

Article Info

Article history :
Received : 19-06-2025
Revised : 20-06-2025
Accepted : 22-06-2025
Pulished : 24-06-2025

Abstract

This study aims to analyze the influence of Balance Funds (DP), Regional Original Revenue (PAD), and Regional Expenditure (BD) on Community Welfare as measured by the Human Development Index (HDI) in 23 Regencies/Cities of Aceh Province during the 2021-2024 period. Using secondary panel data from BPS and DJPK, this study applied the panel data regression analysis method. The results of model selection through the Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test show that the Random Effect Model (REM) is the best estimation model. Classical assumption testing shows models free of multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity, although the residual normality assumptions are not met. The results of the REM estimation show that the Balance Fund has a positive and significant effect on HDI. In contrast, Regional Original Revenue and Regional Expenditure were found to have no significant effect on HDI in Aceh Province during the study period. Simultaneously, the three independent variables were able to explain about 67.17% of the variation in HDI (Adjusted $R^2 = 0.671679$). This study concludes the importance of the role of the Balance Fund in improving welfare in Aceh and suggests optimizing regional expenditure allocation and more effective strategies to increase PAD.

Keywords: Regional Original Revenue Balance Fund, Regional Expenditure, Community Welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh selama periode 2021-2024. Menggunakan data panel sekunder dari BPS dan DJPK, penelitian ini menerapkan metode analisis *regresi* data *panel*. Hasil pemilihan model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa *Random Effect Model (REM)* adalah model estimasi terbaik. Pengujian asumsi klasik menunjukkan model bebas dari *multikolinearitas*, *autokorelasi*, dan *heteroskedastisitas*, meskipun asumsi normalitas residual tidak terpenuhi. Hasil estimasi *REM* menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh selama periode studi. Secara simultan, ketiga variabel independen mampu menjelaskan sekitar 67.17% variasi IPM (Adjusted R^2 = 0.671679). Penelitian ini menyimpulkan pentingnya peran Dana Perimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan di Aceh dan menyarankan optimalisasi alokasi belanja daerah serta strategi peningkatan PAD yang lebih efektif.

Kata Kunci: Dana Perimbangan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah di Indonesia, yang ditandai dengan desentralisasi fiskal, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah nusantara (Rachmawati, 2021). Dalam konteks ini, kemampuan keuangan daerah menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan otonomi daerah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Aceh memiliki status otonomi khusus yang memberikan keleluasaan lebih lanjut dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangannya, termasuk penerimaan dana otonomi khusus. Meskipun demikian, struktur pendapatan daerah Aceh, sebagaimana daerah lain di Indonesia, sangat bergantung pada tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Republik Indonesia, 2009). Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Republik Indonesia, 2004). Di sisi lain, Belanja Daerah, yang dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan, merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan daerah. Salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Produk Nasional Bruto per kapita) (BPS, 2024). Peningkatan IPM menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara variabel-variabel fiskal daerah dengan kinerja keuangan maupun kesejahteraan masyarakat, namun seringkali menunjukkan hasil yang bervariasi. Studi oleh Putri et al. (2024) di Yogyakarta menemukan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun Belanja Modal tidak berpengaruh. Sementara itu, Priyono et al. (2020), dalam studi di Jawa Tengah, menemukan pengaruh positif PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain seperti oleh Urfah (2024) meneliti pengaruh PAD dan Transfer ke Daerah terhadap kemandirian keuangan. Studi-studi ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel fiskal dengan output pembangunan, namun pengaruhnya bisa berbeda antar daerah dan antar variabel. Lebih lanjut, periode 2021-2024 merupakan periode yang menarik karena mencakup masa pemulihan pasca-pandemi *COVID*-19 dan dinamika kebijakan fiskal nasional yang mungkin mempengaruhi transfer ke daerah dan prioritas belanja daerah.

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada Provinsi Aceh selama periode 2021-2024. Meskipun IPM Aceh menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2024), masih perlu dianalisis bagaimana kontribusi variabel-variabel fiskal utama seperti Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Daerah terhadap pencapaian tersebut, terutama dalam konteks dinamika fiskal pasca-pandemi. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah secara parsial maupun potensial secara bersama-sama terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dengan IPM di Provinsi Aceh selama periode tahun 2021-2024?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM) di Provinsi Aceh selama periode 2021-2024. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tren perkembangan Dana Perimbangan, PAD, Belanja Daerah, dan IPM di Provinsi Aceh selama periode 2021-2024.
2. Menganalisis hubungan (korelasi) antara Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Daerah dengan IPM di Provinsi Aceh selama periode 2021-2024.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hubungan antara variabel fiskal daerah dengan kesejahteraan masyarakat dalam konteks spesifik Provinsi Aceh pada periode pasca-pandemi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi Pemerintah Provinsi Aceh dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD)

terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel yang menggabungkan data *cross-section* dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan data time series selama periode 2021-2024 (T=4), sehingga total observasi (N) adalah 92. Data IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sedangkan data DP, PAD, dan BD diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Pemilihan model terbaik antara *Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM)* dilakukan melalui serangkaian pengujian, yaitu Uji *Chow* (membandingkan *CEM* dan *FEM*), Uji Hausman (membandingkan FEM dan *REM*), dan Uji *Lagrange Multiplier (LM)* (membandingkan *CEM dan REM*).

Sebelum melakukan estimasi model terpilih, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas model, meliputi: Uji Normalitas (menggunakan *Jarque-Bera*), Uji *Multikolinearitas* (menggunakan *matriks korelasi* antar variabel independen), Uji *Autokorelasi* (menggunakan *Durbin-Watson test*), dan Uji *Heteroskedastisitas* (menggunakan Uji *Glejser*).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji t (Uji Parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (DP, PAD, BD) terhadap variabel dependen (IPM) secara individual pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Selain itu, Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Model empiris yang diestimasi dalam penelitian ini adalah:

$$IPM_it = \alpha + \beta1DP_it + \beta2PAD_it + \beta3BD_it + e_it$$

Dimana:

IPM_it = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota i pada tahun t

α = Konstanta

$\beta1, \beta2, \beta3$ = Koefisien regresi

DP_it = Dana Perimbangan Kabupaten/Kota i pada tahun t (kemungkinan dalam bentuk log atau skala tertentu)

PAD_it = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota i pada tahun t (kemungkinan dalam bentuk log atau skala tertentu)

BD_it = Belanja Daerah Kabupaten/Kota i pada tahun t (kemungkinan dalam bentuk log atau skala tertentu)

e_it = Error term

i = Kabupaten/Kota (1-23)

t = Tahun (2021-2024)

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus) sehingga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh menjadi sampel penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel (pooled data) yang menggabungkan data cross section (23 kabupaten/kota) dengan data time series (periode 2021-2024). Sumber data diperoleh dari:

a. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh untuk data kesejahteraan masyarakat
b. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk data keuangan daerah
c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk data dana perimbangan
d. Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Aceh

4. Sofwer Analisis

Analisis data menggunakan sofware eviews 12 untuk memastikan akurasi hasil analisis regresi data panel dan pengujian asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis data kuantitatif menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (diukur dengan IPM) pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2021-2024.

1. Analisi Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif terhadap 92 observasi menunjukkan variasi pada setiap variabel yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

No	Keterangan	LOG_DP	LOG_PAD	LOG_BD	LOG_KM
1	*Mean*	20.40290	18.47837	20.91361	4.281979
2	*Median*	20.38711	18.57695	20.80548	4.276666
3	*Maximum*	21.14339	20.39831	24.99983	4.465908
4	*Minimum*	19.41592	16.20723	19.09209	4.174387
5	*Std. Dev.*	0.340910	0.715179	0.663542	0.061490
6	*Skewness*	0.114464	-0.181302	2.775002	0.972073
7	*Kurtosis*	2.645696	4.322960	18.11059	4.028760
8	*Jarque-Bera*	0.682098	7.213207	993.3413	18.54586
9	*Probability*	0.711024	0.027144	0.000000	0.000094

10	*Sum*	1877.067	1700.010	1924.052	393.9420
11	*Sum Sq. Dev.*	10.57601	46.54480	40.06625	0.344069
12	*Observations*	92	92	92	92

Pada penelitian ini, observasi dilakukan sebanyak 92 kali untuk Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD) selama periode 2021-2024. Untuk Dana Perimbangan, nilai terendah tercatat 19.41592, tertinggi 21.14339, dengan rata-rata 20.40290 dan standar deviasi 0,340910, menunjukkan fluktuasi yang rendah. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah 16.20723, tertinggi 20.39831, rata-rata 18.47837, dan standar deviasi 0,715179. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, PAD juga menunjukkan fluktuasi yang rendah. Sementara itu, Belanja Daerah mencatat nilai terendah 19.09209, tertinggi 24.99983, rata-rata 20.91361, dan standar deviasi 0,663542. Serupa dengan PAD, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan fluktuasi yang rendah pada Belanja Daerah.

2. Analisis Korelasi

Tabel 2. Analisis Korelasi

No	*Correlation Probability*	LOG KM	LOG DP	LOG PAD	LOG_BD
1	LOG KM	1.000000			
		-			
2	LOG DP	0.037842	1.000000		
		0.7202	-		
3	LOG PAD	0.196827	0.564856	1.000000	
		0.0600	0.0000	-	
4	LOG_BD	-0.015619	0.566868	0.460244	1.000000
		0.8825	0.0000	0.0000	-

Berdasarkan tabel 2. di atas untuk melihat korelasi antara seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel Kesejahteraan Masyarakat (IPM). Adapun hasil analisis korelasi variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dana Perimbangan (DP) berkorelasi positif dan tidak signifikan pada level 10% dengan kesejahteraan masyarakat sebesar 0.7202.
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkorelasi positif dan signifikan pada level 1% dengan kesejahteraan masyarakat sebesar 0.0600.
c. Belanja Dearah (BD) berkorelasi negatif dan tidak signifikan pada level 10% dengan kesejahteraan masyarakat sebesar 0.8825.

3. Teknik Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan metode statistik yang berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua model regresi, khususnya dalam konteks analisis

data panel untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), uji ini krusial dalam membantu peneliti memilih model yang paling tepat. Apabila nilai probabilitas chi-square yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka *Common Effect Model* (CEM) dianggap lebih sesuai. Namun, jika nilai probabilitas chi-square melebihi 0,05, Fixed Effect Model (FEM) menjadi pilihan model yang lebih baik (Sari & Rahman, 2022).

Tabel 3.1. Uji Chow

No	*Effects Test*	*Statistic*	*d.f.*	*Prob.*
1	*Cross-section F*	58.817428	(22,66)	0.0000
2	*Cross-section Chi-square*	278.352720	22	0.0000

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan alat statistik yang dipakai untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis data panel. Priyatno (2022) menjelaskan bahwa tujuan pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan pada estimasi koefisien dari kedua model tersebut, sehingga membantu peneliti dalam memilih model yang paling tepat. Jika nilai probabilitas dari uji Hausman lebih besar dari 0,05 (ambang batas toleransi kesalahan), maka *Random Effect Model* (REM) dianggap sebagai model yang paling tepat. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang dipilih. Hasil uji Hausman untuk penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Uji Chow

No	*Test Summary*	*Chi-Sq. Statistic*	*Chi-Sq. d.f.*	*Prob.*
1	*Cross-section random*	5.504448	3	0.1384

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada Uji Hausman sebesar 0,1384 > 0,05. Dengan kata lain, Uji Hausman memilih *Random Effect Model* (REM) sebagai model yang tepat, sehingga estimasi data pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *common effect model* (CEM) dan *random effect model* (REM). Berikut adalah hasil dari Uji Lagrange Multiplier dalam penelitian ini:

Tabel 3.3. Uji Lagrange Multiplier

		Test Hypothesis		
No	**Keterangan**	***Cross-section***	***Time***	***Both***
1	*Breusch-Pagan*	106.5724	0.000719	106.5731
		(0.0000)	(0.9786)	(0.0000)
2	*Honda*	10.32339	0.026818	7.318702

		(0.0000)	(0.4893)	(0.0000)
3	*King-Wu*	10.32339	0.026818	3.601285
		(0.0000)	(0.4893)	(0.0002)
4	*Standardized Honda*	10.98662	0.504858	4.670369
		(0.0000)	(0.3068)	(0.0000)
5	*Standardized King-Wu*	10.90662	0.504858	1.658118
		(0.0000)	(0.3068)	(0.0486)
6	*Gourieroux, et al.*	-	-	106.5731
				(0.0000)

Berdasarkan Tabel 3.3. di atas, hasil uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan* adalah 0.0000. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa variabel residual dalam suatu model regresi terdistribusi secara normal, sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali (2021). Menurut Dianti dan Handayani (2024), pengujian ini penting untuk membantu dalam pemilihan metode analisis yang tepat serta meningkatkan ketepatan hasil analisis, sehingga asumsi-asumsi statistik yang diperlukan dapat terpenuhi dengan baik.

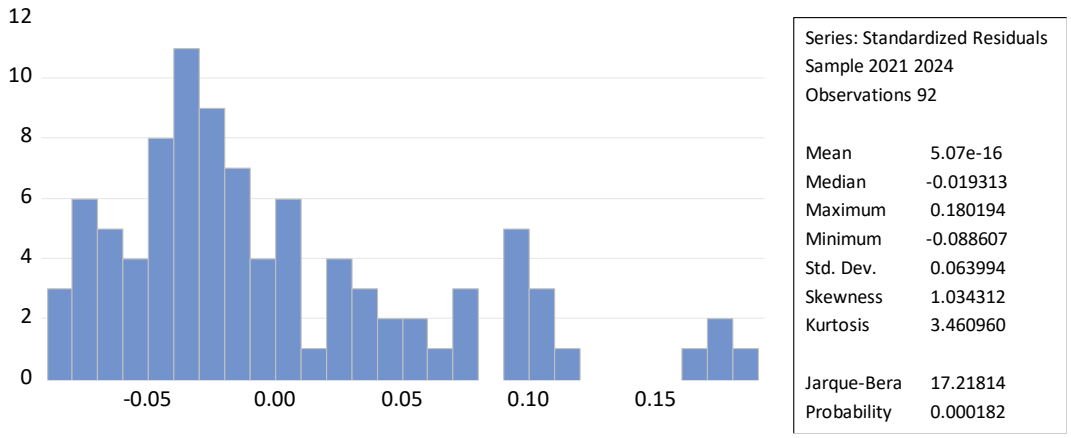

Berdasarkan visualisasi yang disajikan, hasil uji *Jarque-Bera* menunjukkan nilai sebesar 17.21814 dengan *probabilita*s 0,000000. Karena nilai *probabilitas* ini jauh di bawah batas toleransi kesalahan standar 5%, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Namun, mengingat sifat data penelitian ini yang berbentuk panel, di mana setiap penampang melintang (*cross section*) menunjukkan *tren* yang bervariasi setiap tahunnya, asumsi normalitas dapat diabaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati & Porter (2022).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi, karena hal ini dapat memengaruhi akurasi estimasi koefisien. Ghozali (2021) menyatakan bahwa model regresi yang ideal seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen melebihi 0,80, hal tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai tersebut di bawah 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius (Dianti dan Handayani, 2024).

Tabel 4.2. Uji Multikolinearitas

No	Keterangan	*LOG DP*	*LOG PAD*	*LOG BD*
1	LOG DP	1.000000	0.564856	0.566868
2	LOG PAD	0.564856	1.000000	0.460244
3	LOG BD	0.566868	0.460244	1.000000

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa semua *cell* yang menghubungkan variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi di bawah 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas dalam penelitian ini. Dengan kata lain, seluruh variabel independen yang diteliti, yaitu DP, PAD, dan BD, tidak menunjukkan adanya hubungan atau korelasi satu sama lain.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merujuk pada hubungan antara variabel gangguan dari satu observasi dengan observasi lainnya. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji autokorelasi dapat terjadi karena adanya keterkaitan antar observasi yang berurutan dalam waktu. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu 't' dengan kesalahan pada periode 't-1' dalam sebuah model linear. Jika korelasi tersebut ditemukan, maka ini mengindikasikan adanya masalah autokorelasi, yang berarti residual tidak bersifat independen antar observasi (Ghozali, 2021).

Tabel 4.3. Uji Autokorelasi

No	Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
1	*R-squared*	0.169049	*Mean dependent var*	0.541240
2	*Adjusted R-squared*	0.140722	*S.D. dependent var*	0.016917
3	*S.E. of regression*	0.015682	*Sum squared resid*	0.021641
4	*F-statistic*	5.967604	*Durbin-Watson stat*	1.101725
5	*Prob(F-statistic)*	0.000945		

Berdasarkan data pada Tabel 4.3. penelitian ini menghasilkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.101725. Nilai ini berada dalam rentang yang diizinkan untuk uji autokorelasi, yaitu antara -2 dan 2. Mengacu pada kriteria Ghozali (2021), nilai tersebut menunjukkan bahwa

tidak ada indikasi autokorelasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya dalam sebuah model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini membandingkan nilai probabilitasnya dengan α = 5%. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka heteroskedastisitas terjadi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka heteroskedastisitas tidak terjadi (Gadafi, 2024).

Tabel 4.3. Uji Heteroskedastisitas

No	Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
1	C	0.167437	0.270189	0.6197030	0.5371
2	LOG_DP	-0.005809	*0.012151*	-0.478040	0.6338
3	LOG_PAD	0.002451	*0.003325*	0.736966	0.4631
4	LOG_BD	-0.002094	0.002617	-0.799879	0.4259

5. Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan metode pemilihan model yang telah diterapkan dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Estimasi Regresi Data Panel dengan Random Effect Model (REM)

No	Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
1	C	2.660367	0.453811	5.862277	0.0000
2	LOG_DP	0.082372	0.019985	4.121628	0.0001
3	LOG_PAD	0.002284	0.004862	0.469836	0.6400
4	LOG_BD	-0.004840	0.003670	-1.318813	0.1918

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.954133	*Mean dependent var*	4.281979
Adjusted R-squared	0.936759	*S.D. dependent var*	0.061490
S.E. of regression	0.015463	*Akaike info criterion*	-5.267618
Sum squared resid	0.015781	*Schwarz criterion*	-4.554938
Log likelihood	268.3104	*Hannan-Quinn criter.*	-4.979974
F-statistic	54.91778	*Durbin-Watson stat*	1.607434
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan Tabel 5. persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

KM = 2.660367 + 0.082372DP + 0.002284PAD - 0.004840BD

Dari persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 2.660367 mengindikasikan bahwa jika Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD) tidak memiliki nilai (bernilai nol), maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan tetap pada angka 2.660367.

Hasil estimasi dari Tabel 5. juga menunjukkan beberapa kesimpulan:

a. Variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan koefisien sebesar 0.082372. Ini berarti bahwa setiap peningkatan pada Dana Perimbangan akan berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan koefisien sebesar 0.002284. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada PAD akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Sebaliknya, variabel Belanja Daerah (BD) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan koefisien sebesar -0.004840. Ini berarti bahwa peningkatan pada Belanja Daerah justru akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Adapun nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) dalam penelitian ini adalah 0.671679 atau 67.17%. Angka ini menunjukkan bahwa variasi dalam Kesejahteraan Masyarakat dapat dijelaskan sebesar 67.17% oleh variabel Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah. Sisa 32.83% variasi dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 5, hasil estimasi menggunakan *Random Effect Model* menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki nilai t-hitung sebesar 3.130762, yang lebih besar dari t-tabel 1.66235. Dengan nilai *probabilitas* (signifikansi) sebesar 0.0001, yang jauh di bawah ambang batas 0,05, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Ini berarti data penelitian mendukung hipotesis bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM). Implikasinya, peningkatan alokasi Dana Perimbangan oleh pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh akan berkorelasi langsung dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan dana ini memungkinkan percepatan program-program yang mendukung kesejahteraan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan Dana Perimbangan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Hanantoko (2020) dan Kurniasari (2021), yang juga menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana diungkapkan oleh Hanantoko (2020), "Dana Perimbangan berperan penting dalam mendukung program-program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat."

2. Pengaruh PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 5, hasil estimasi menggunakan *Random Effect Model* menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-hitung sebesar 3.130762, dengan t-tabel 1.66235, dan nilai signifikansi sebesar 0.6400. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Ini berarti data tidak mendukung hipotesis penelitian, sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM). Dengan kata lain, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tinggi, hal tersebut tidak secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena ini mungkin disebabkan oleh pengelolaan PAD yang kurang efisien, di mana dana yang tersedia tidak dialokasikan secara optimal untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, faktor-faktor lain seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menjadi penyebab mengapa PAD belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya oleh Hauzan et al. (2021), Sahlan et al. (2022), dan Riviando et al. (2019), yang juga menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.10, hasil estimasi menggunakan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) memiliki nilai t-hitung sebesar 3.130762. Meskipun nilai t-tabel adalah 1.66235, nilai *probabilitas* (signifikansi) yang tercatat sebesar 0.1918, lebih besar dari ambang batas 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak, yang berarti data penelitian tidak mendukung adanya pengaruh signifikan Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM). Dengan kata lain, peningkatan Belanja Daerah oleh pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tidak secara otomatis berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengelolaan anggaran yang kurang efisien, alokasi dana yang tidak tepat sasaran untuk sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta kurangnya transparansi dan pengawasan dalam

penggunaan anggaran. Ketidakjelasan prioritas belanja dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, sehingga dana yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak tersalurkan secara optimal. Tantangan-tantangan ini, khususnya di Provinsi Aceh, dapat memperburuk situasi dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan serta pencapaian target pembangunan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan studi sebelumnya oleh Intervensi et al. (2023) dan Damayanti dan Suryaningrum (2023), yang juga menunjukkan bahwa Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah:

a. **Optimalisasi Dana Perimbangan:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas penyerapan dan efektivitas penggunaan dana perimbangan melalui perencanaan yang lebih baik dan monitoring yang ketat terhadap implementasi program dan kegiatan.
b. **Peningkatan PAD:** Diperlukan strategi peningkatan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan, perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, dan pengembangan sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, industri, dan perdagangan.
c. **Rekomposisi Belanja Daerah:** Pemerintah daerah perlu melakukan rekomposisi belanja daerah dengan meningkatkan alokasi belanja modal dan belanja langsung yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. **Penguatan Kapasitas Fiskal:** Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama periode 2021-2024. Menggunakan data panel sekunder dan metode regresi data panel, model estimasi terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM) setelah melalui *Uji Chow*, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Pengujian asumsi klasik menunjukkan model bebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, meskipun asumsi normalitas residual tidak terpenuhi namun dapat diabaikan mengingat sifat data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (DP) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Perimbangan berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah (BD) ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Meskipun PAD dan Belanja Daerah tinggi, hal tersebut

belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mungkin disebabkan oleh pengelolaan yang kurang efektif atau alokasi yang tidak tepat sasaran.

Secara simultan, ketiga variabel independen (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah) mampu menjelaskan sekitar 67.17% variasi dalam IPM, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peran Dana Perimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan di Aceh. Untuk optimalisasi, disarankan agar alokasi belanja daerah lebih efektif dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Belanja Daerah. *Universitas Atma Jaya*, *July*, 1–23.

Asiva Noor Rachmayani. (2019). Analisis struktur kovarians mengenai indikator kesehatan terkait yang berfokus pada persepsi kesehatan subjektif pada lansia yang tinggal di rumah. Judul 6.

Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, *19*(02), 97–107.

Azizah, N. U. R., Studi, P., Masyarakat, P., Konseling, J., Pengembangan, D. A. N., & Dakwah, F. (2024). *Melaui Program Pilar Ekonomi Lazismu*.

Badan Pusat Statistik. (2023). Pendapatan Nasional Indonesia 2019-2023. *Badan Pusat Statistik*, 78.

BPS. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2023. *Badan Pusat Statistik Aceh*, *66*, 1–12.

Damayanti, A. P., & Suryaningrum, D. H. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm). *Jurnal Maneksi*, *12*(3), 614–627. https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1733

Dianti, R. C., & Handayani, A. E. (2024). Alberta Esti Handayani, SE., Ak., MM Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia ABSTRAK. *Soetomo Accounting Review*, *2*(4), 607–619.

Djpk. (2023). *DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*. Kementrian Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan#

Ekonomi, J., & Unkhair, P. (2024). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair Vol 15, No. 1. | 1*. *15*(1), 1–23.

Ekonomi, P., & Ferino, A. (2023). *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan , Inflasi , dan Investasi Terhadap*. *22*.

Fanika, M. I. (2022). *Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Program Vaksinasi Covid-19*. 181. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22221/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22221/1/Muhammad Ikbal Fanika%2C 201007003%2C PS%2C KPI%2C 082275758919.pdf

Fatimah, A. N., & Priyono, N. (2020). Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, *4*(2), 75. https://doi.org/10.33021/jaaf.v4i2.1073

Gadafi, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen STIE AMM*, *2*(1), 12–26. https://stieamm.ac.id/jurnal/kredibel/article/view/400

Haeruddin, D. C. (2025). *Bibliometric Analysis of Global Literature : Smart City Innovation for the Development of Central Maluku Regency*. *1*(1).

Hanantoko, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 17. https://doi.org/10.30742/economie.v2i1.1152

Hauzan, A., Yulmardi, Y., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, *10*(3), 211–222. https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16496

Indonesia, P. K. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta*.

Intervensi, J., Jisp, P., & Siregar, Z. (2023). Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, *4*(1), 9–18. https://doi.org/10.30596/jisp.v4i1.13030

Keuangan, P., & Nomor, U. (2023). Salina, N.[1]. *Oxford English Dictionary*. https://doi.org/10.1093/oed/9600622025

Khairil Amar, T., dan Eddy Gunawan Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh, Z., & Gunawan, E. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh. *JIM EKP) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, *8*(1), 2549–8363.

Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *8*(6), 1390–1422.

Kurniasari, R. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*. 1–23. www.bps.go.id.

Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI*. *11*, 67–83.

Muttaqien, Iqbal, Maisyuri, Fauzan, Shalawati, Rahmi, U., & Nopita, E. (2023). Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal EMT KITA*, *7*(3), 763–770. https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1250

Najiya, N., & Diah Anggeraini Hasri. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(1), 150–157.

https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2107

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *2*(1), 30. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45

Nasir, Yuslinaini, A. Hamid, Yusuf, Z., & Zakaria. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, *7*(3), 676–683. https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1199

Ningrum, H. (2017). *Herawati Ningrum, 2020 FLUKTUASI HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN (Analisis Komponen Deret Waktu : Variasi Siklis) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu*. 36–42.

Nofiyanti, F. (2024). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Musi Rawas Utara*. https://repository.unja.ac.id/62976/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/62976/1/tesis Fitri Nofiyanti.pdf

Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2373–2390. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218

Potensi, A., Efektivitas, D. A. N., Serta, B., & Terhadap, K. (2023). *Analisis potensi dan efektivitas pbb-p2 dan bphtb serta kontribusinya terhadap penerimaan pad di kabupaten luwu utara*.

Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, *5*(2), 212–225. https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Renstra, R. S., & Pengantar, K. (2022). *Rancangan Akhir DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2017 – 2022*.

Riviando, A., Agustin, H., Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(1), 1–17. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1

Sahlan, E., Yusuf, Y., & Susanto, D. (2022). Pengaruh Pendataan Asli Daerah (Pad) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm). *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, *4*(1), 18–22. https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592

Saputri, B. F., Studi, P., Publik, A., Publik, D. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2024).

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Pelayanan Publik.

Sulastri, E., & Efendri, E. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, *6*(2), 85–96. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i2.572

Sutono, I. A., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *3*(2), 150–168. https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.463

Syeirazi, M. K., Prasojo, E., & Muslim, M. A. (2024). Indonesian Petroleum Industry and Development: A Centennial Survey and Future Prospects. *Journal of Economics and Business*, *7*(2). https://doi.org/10.31014/aior.1992.07.02.583

Tim Penulis. (2015). *Yusny Saby Sang Motivator: Menelusuri Karakter Pemimpin Jujur Dan Ikhlas Dalam Membangun Umat*. 1–472.

Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *3*(2), 220–238. https://doi.org/10.18196/rab.030247

Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *7*(2), 364–378. https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137